

DAFTAR PUSTAKA

- A., Effendi dan Purnomo F. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Adji, Indriyanto Seno. *Tindak Pidana Ekonomi, Bisnis, dan Korupsi Perbankan, Modul Kuliah "Kejahatan Bisnis."* Bandung: Universita Padjajaran, Program Pascasarjana, 2004.
- Agustalita, Dinda Heidiyuan dan Deni Setya Bagus Yuherawan. "Makna 'Kepentingan Umum' Pada Kewenangan 'Deponering' Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Suara Hukum* 4 No. 1 (2022).
- Ahmad Hajar Zunaidi. *Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2002.
- . *Pembaharuan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, 2005.
- . *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, n.d.
- Arief, M. Irsan. *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana / Korupsi*. Jakarta Pusat: Mekar Cipta Lestari, 2022.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Bemmelen, J. M. van. *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum (Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel)*. Bandung: Binacipta, 1984.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia - Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidana (Politik Hukum dan Pidana)" (2008).
- Dkk, Schaffmeister. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Efendi, A'an. "Intepretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 12 No. 3 (2019).
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- . *Problematika Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Diedit oleh Risna Trisnadewi. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.
- et al, Sukarno Aburaera. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Pertama. Jakarta:

- Kencana, 2013.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5 no. 2 (2020).
- Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hadijah. "Tinjauan Yuridis Peniadaan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif." *Jurnal Manajemen Hukum dan Sosial (JMHS)* 1 Nomor 2 (2023).
- Hadjon, P.M. dan Djatmiati T. S. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- IIR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, 2018.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Indonesia, Government of. *Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 2014*.
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/30TAHUN2014UUPenjel.pdf>
- Indonesia, Republik. "Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana" (n.d.).
- . *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, n.d.
- . *Kitab Undang Undang Hukum Pidana - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023*, n.d.
- . *Penjelasan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, n.d.
- . *Penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, n.d.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, n.d.
- . *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 2021.
- . *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1999.

- . *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.
- . *Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*, n.d.
- . *Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, n.d.
- . *Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara*, n.d.
- . *Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, n.d.
- Indriana, Yayan. “Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Cepalo* 2 Nomor 2 (2018).
- Isrok. *Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoad The Devil is In Every Detail Sebagai Konsep Teori*. Malang: Fakultas Hukum Brawijaya, 2017.
- Januarsyah, Mas Putra Zenno. “Penerapan Prinsip Ultimum Remidium Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Yudisial* 10 no. 3 (2017).
- Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. “Tugas Pokok dan Fungsi.” <https://dikbud.biakkab.go.id/Index/halamantupoksi>.
- Korupsi, Pusat Edukasi Anti. “Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang Ditimbulkannya.” Diakses Juli 6, 2024. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>.
- Lamiintang. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Strafrecht*. Bandung: Pionir Jaya, 1981.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Latif, H. Abdul. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Diedit oleh Tarmizi. 2 ed. Depok: Kencana, 2017.
- Marbun, Rocky. *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Titik Singgung Mengadili Menyalahgunakan Kewenangan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara [Perspektif Teoretis, Normatif, Doktrina, dan Praktik]*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Munawar, Kukun Abdul Syakur. “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ilmiah Galuh*

Justisi Nomor 2 11 (2023).

- Praja, R. Achmad S. Soemadi. *Pengertian Serta Sifat Melawan Hukum bagi Terjadinya Tindak Pidana (Dihubungkan dengan Beberapa Putusan Mahkamah Agung)*. Bandung: Armico, 1983.
- Priyatno, Admaja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Roihanah, Rif'ah. "Masalah Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Online* (2017). <http://gbkp.or.id/index.php/208-gbkp/bacaanpopuler/319-masalahpenegakan-hukum-di-indonesia>.
- Roza dan Gokma Toni Parlindungan S, Darmini. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia." *Lex Journalica Nomor 1* 18 (2021).
- Saidi, Muhammad Djafar, dan dan Eka Merdekawati Djafar. *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*. Diedit oleh Yayasan Sri Hayati. 4 ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Soebroto, Arief Christiono. *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*, n.d.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Utrecht, E. dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1990.
- Wahju Prijo Djatmiko. *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Perspektif Budaya Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan:

PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Yudi Kristiana. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

Yustisiani, Septri. "Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materiil Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi" (n.d.).

